

REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJALENGKA 2015-2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJALENGKA**

**REVIU RENCANA STRATEGIS
BPS KABUPATEN MAJALENGKA
2015-2019**

**No. Publikasi : 02110.1206
Katalog BPS : 1201010
Ukuran Buku : 17 cm x 24 cm
Jumlah Halaman : x + 68 halaman**

**Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka**

**Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka**

**Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka**

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Majalengka periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Majalengka untuk 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu ke Renstra BPS. Renstra BPS Kabupaten Majalengka disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPS Kabupaten Majalengka pada periode 2010-2014 dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS Kabupaten Majalengka.

Menindaklanjuti Peraturan Kepala BPS No. 2 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, maka Renstra BPS Kabupaten Majalengka mengalami reviu untuk menjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan teknis dan administrasi dalam mendukung kegiatan teknis dan administrasi BPS dalam kurun waktu 2015-2019 sesuai dengan IKU yang baru. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan masing-masing subbag/seksi di lingkup BPS Kabupaten Majalengka dan diwujudkan setiap tahunnya dalam bentuk Perjanjian Kinerja.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan Renstra ini Kritik dan saran untuk perbaikan Renstra ini sangat kami hargai Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita Amin.

Majalengka, Juni 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Majalengka,



R. Denny Lesmana, S.Kom

Ringkasan Eksekutif

BPS Kabupaten Majalengka mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku .

Renstra BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS Kabupaten Majalengka sebagai pendukung kelancaran penyelenggara kegiatan teknis dan administrasi statistik dalam melaksanakan visi dan misi BPS khususnya serta pembangunan nasional di bidang statistik pada umumnya selama 2015-2019

Visi BPS Kabupaten Majalengka sebagaimana visi BPS adalah *“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”*. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik; dan (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1)

kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS Kabupaten Majalengka 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Singkatan	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	3
1.2 Kondisi Umum	5
1.3 Potensi dan Permasalahan	6
1.3.1. Potensi yang Dimiliki	7
1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi	9

BAB 2 VISI, MISI DAN TUJUAN BPS KABUPATEN MAJALENGKA

2.1 Visi BPS Kabupaten Majalengka.....	13
2.2 Misi BPS Kabupaten Majalengka	13
2.3 Tujuan BPS Kabupaten Majalengka	14
2.4 Sasaran Strategis BPS Kabupaten Majalengka	15

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPS.....	21
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis BPS Kabupaten Majalengka	22
3.3 Program dan Kegiatan	24

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja	31
4.2 Kerangka Pendanaan BPS Kabupaten Majalengka	39

BAB 5 PENUTUP

5.1 Penutup	43
-------------------	----

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kabupaten Majalengka ..	47
Lampiran 2 : Pendanaan per Kegiatan	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Tujuan, Indikator Kinerja dan Target BPS Kabupaten Majalengka 2015 - 2019	15
Tabel 3-1	Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Majalengka 2015-2019	25
Tabel 4-1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	32
Tabel 4-2	Indikator Kinerja Program	36
Tabel 4-3	Alokasi Anggaran 2015-2019 Menurut Program (Juta Rupiah)	39

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
Cerdas	: Change and Reform for the Development of Statistics
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
K/L	: Kementerian/Lembaga
KemenPAN dan RB:	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Program DMPTTL	: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program PPIS	: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Program PSPA	: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Sensus Ekonomi
SIMPEG	: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SNA	: System National Account
SSN	: Sistem Statistik Nasional
Statcap	: Statistical Capacity Building

BAB 1

Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Kondisi Umum
- 1.3 Potensi dan Permasalahan



1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (*Medium-Term Expenditure Framework*), penganggaran terpadu (*Unified Budget*), dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budget*). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi.

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan

pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan *good governance*.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Kabupaten Majalengka perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean government* di Indonesia.

BPS Kabupaten Majalengka dalam melakukan tugasnya selama lima tahun dituangkan dalam Renstra BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2015-2019. Renstra BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Kabupaten Majalengka menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Renstra BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Kabupaten Majalengka dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2. Kondisi Umum

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dan strategi melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien.

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan BPS Kabupaten Majalengka akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang ditetapkan oleh BPS RI untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan yang sejalan RPJM daerah, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

Selama ini, BPS Kabupaten Majalengka telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi diperoleh melalui Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan kependudukan. Beberapa indikator tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

BPS Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 2010 - 2014 telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi, diantaranya:

1. Indikator sosial menghasilkan data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan dan angka pengangguran.
2. Indikator Ekonomi menghasilkan data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, data produksi padi dan palawija dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .

BPS Kabupaten Majalengka juga telah memenuhi kebutuhan pemerintah maupun pemerintah daerah, diantaranya melalui Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 dan 2011, serta Pendataan Usaha Tani 2009 untuk mendukung program-program khusus, seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sejenisnya.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.3.1. Potensi Yang Dimiliki

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

(NSPK).

Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kabupaten Majalengka merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen.

Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan. Data dan informasi statistik berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian) maupun pemerintah daerah sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Sektor swasta juga memerlukan data BPS untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil.

Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS Kabupaten Majalengka dirasakan

masih rendah, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.

1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui.

Sementara itu permasalahan permasalahan eksternal yang ada adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan kualitas data yang dihasilkan belum optimal. Disamping itu, target sampel yang tidak terpenuhi terutama disebabkan keengganan masyarakat menjadi responden, menyebabkan *response rate* yang rendah.

Selain itu, kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Salah satu kendalanya adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga

mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Hal ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang kerap terkendala adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi cakupan. Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien.

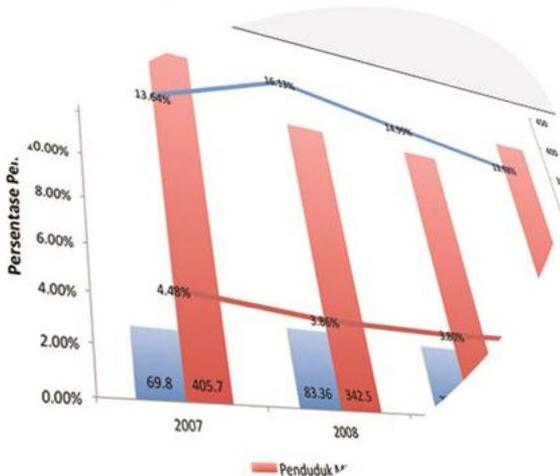
Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi empat prinsip dasar dari sepuluh prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain :

- i. *National Statistical Offices* (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.
- ii. Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.
- iii. Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.
- iv. Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.

BAB 2

Visi, Misi dan Tujuan BPS Kabupaten Majalengka

- 2.1 Visi BPS Kabupaten Majalengka
- 2.2 Misi BPS Kabupaten Majalengka
- 2.3 Tujuan BPS Kabupaten Majalengka
- 2.4 Sasaran Strategis BPS Kabupaten Majalengka



2.1. Visi BPS Kabupaten Majalengka

Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi BPS Kabupaten Majalengka 2015-2019 sesuai dengan visi yang dibangun oleh BPS adalah:

"Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua"

("The Agent of Trustworthy Statistical Data for All")

Kata "pelopor" mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata "data statistik yang terpercaya" yaitu statistik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kata "untuk semua" dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional.

2.2. Misi BPS Kabupaten Majalengka

Untuk mencapai visi sebagai "Pelopor data statistik terpercaya untuk semua", maka ditetapkan misi BPS Kabupaten Majalengka yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Misi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
- b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan

- c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.3. Tujuan BPS Kabupaten Majalengka

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Rumusan tujuan BPS Kabupaten Majalengka untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Tujuan I: Peningkatan kualitas data statistik;

Tujuan II: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

Tujuan III : Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Kabupaten Majalengka berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS dalam tempo 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

Guna memudahkan penilaian pencapaian kinerja, beberapa indikator dan target ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Secara spesifik indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 2-1 Tujuan, Indikator Kinerja dan Target
BPS Kabupaten Majalengka 2015-2019

No	Tujuan		Target				
	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2.	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %
3.	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	60	63	65	68	70

2.4. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Majalengka

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan kualitas data statistik” adalah:

- 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran:

- 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
 - 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;
 - 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;
 - 1.1.4. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu; dan
 - 1.1.5. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu.
 - 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*responden engagement*), dengan indikator sasaran:
 - 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan pendekatan rumah tangga.
 - 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan pendekatan usaha.
 - 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, adalah:
 - 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*), dengan indikator sasaran:
 - 2.1.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS.
 - 2.1.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* BPS;
 - 2.1.3. Persentase Kementrian dan Lembaga yang menggunakan data

BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

2.1.4. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS;

2.1.5. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, adalah:

3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dengan indikator sasaran:

3.1.1 Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

3.1.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau strata I

3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS dengan indikator sasaran :

3.2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

2.5 Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah:

- **Profesional** (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),
- **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),

- **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,
- b. Efektif
memberikan hasil maksimal,
- c. Efisien
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,
- d. Inovatif
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,
- e. Sistemik
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. **Integritas**

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdianya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,
- b. Disiplin
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

- c. Konsisten
selarasnya kata dengan perbuatan,
- d. Terbuka
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,
- e. Akuntabel
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

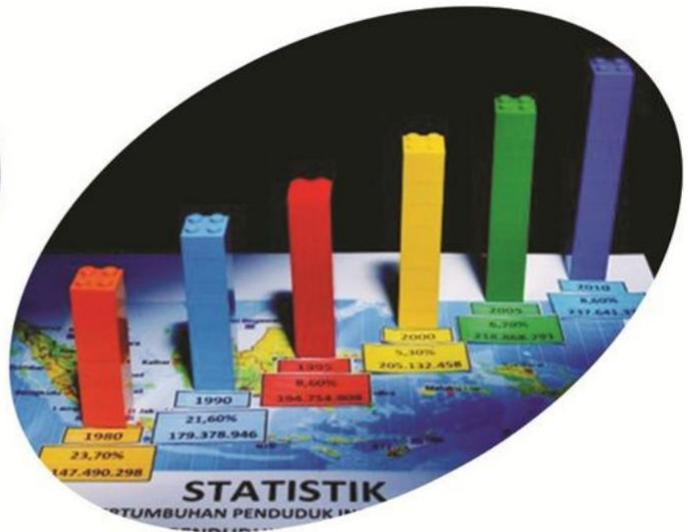
Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terpercaya
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,
- b. Jujur
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,
- c. Tulus
melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,
- d. Adil
menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

BAB 3

Arah Kebijakan dan Strategi

- 1.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPS
- 1.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS
Kabupaten Majalengka
- 1.3 Program dan Kegiatan



3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi, Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan, Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial, Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Majalengka

Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Kabupaten Majalengka mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, sebagai berikut :

- a) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.
- b) Peningkatan respons rate.
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat.
- d) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS
- e) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
- f) Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja.
- g) Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN.

Sedangkan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;
- b) Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;
- c) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;
- d) Meningkatkan Customer Relationship Management;
- e) Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai;
- f) Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- g) Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI
- h) Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

- i) Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif
- j) Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik, Sedangkan untuk BPS Kabupaten Majalengka mempunyai 1 (satu) program teknis yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (Program PPIS) dan 2 (dua) program generik, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (Program DMPTTL) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (Program PSPA).

Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah. Secara lengkap setiap kegiatan beserta indikator kinerja, target pencapaian dan alokasi anggaran yang dibutuhkan disajikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan penjabarannya sampai dengan kegiatan disajikan pada tabel 3.1.

Tabel.3-1 Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Majalengka 2015-2019

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Arah Kebijakan (5)	Strategi (6)	Program (7)	Kegiatan (8)
Pelopop data statistik terpercaya untuk semua	1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional	1. Peningkatan kualitas data statistik	1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran: 1.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik; 1.2 Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; 1.3 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS; 1.4 Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu; dan 1.5 Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu.	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;	1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;	Program PPIS	KEGIATAN 2895: (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Arah Kebijakan (5)	Strategi (6)	Program (7)	Kegiatan (8)
			<p>2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>), dengan indikator sasaran:</p> <p>2.1 Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga;</p> <p>2.2 Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha; dan</p> <p>2.3 Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha.</p>	1. Peningkatan <i>response rate</i> ;	1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;	Program PPIIS	KEGIATAN 2895: (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Arah Kebijakan (5)	Strategi (6)	Program (7)	Kegiatan (8)
	3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan	3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	<p>4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dengan indikator sasaran:</p> <p>4.1 Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan</p> <p>4.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I.</p>	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja;	<p>1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif;</p> <p>2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI;</p>	Program DMPTTL	KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)
			<p>5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS dengan indikator sasaran :</p> <p>5.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat</p>	1. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja;	<p>1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</p>	Program DMPTTL	KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan

BPS Kabupaten Majalengka



		Nonmigas		
		Indonesia	Kawasan Berikat	Indonesia
Nilai CIF (Juta USD)				
9,4	6,0	12 834,1	2 046,2	16 463,5
35,5	47,5	13 225,0	1 982,9	16 660,5
531,0	44,0	12 105,0	1 937,6	15 636,0
137,3	36,9	13 279,7	1 847,8	17 417,0
1 672,0	38,7	9 340,1	1 440,8	13 012,0
3 715,6	10,7	11 794,2	1 710,1	15 509,0
3 473,9	5,8	12 200,1	1 882,4	15 670,0
1 938,9	55,2	11 210,4	1 719,4	15 500,0
221,6	88,4	11 234,3	1 735,2	15 500,0
50,5	8,7	11 365,7	1 712,0	15 500,0
2	11,8	10 333,5	1 552,0	15 500,0
8	11,9	10 529,1	1 552,0	15 500,0
	8,3	12 562,2	1 712,0	15 500,0



4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015–2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis BPS Kabupaten Majalengka untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015-2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS 2015-2019 disertai target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
T.1. Peningkatan kualitas data statistik	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80 %
		IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	62 %
		IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100 %
		IKSS 1.4. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	67
		IKSS 1.5. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	1
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	99,5 %
		IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan	97 %

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
		pendekatan usaha	
		IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	100 %
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	IKSS 3.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	84 %
		IKSS 3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	500
		IKSS 3.3. Persentase Kementrian dan Lembaga yang menggunakan data BPS untuk monitoring dan evaluasi pembangunan	60%
		IKSS 3.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan	65 %
		IKSS 3.5. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	78 %
T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	IKSS 4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	40 %
		IKSS 4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	40 %

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
	SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	IKSS 5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan ketiga program disertai masing-masing kegiatan perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Kabupaten Majalengka 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Program

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET KINERJA (2019)
P.1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80 %
		IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	62 %
		IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100 %
		IKSS 1.4. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	67
		IKSS 1.5. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	1
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	99,5 %
		IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen	97 %

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET KINERJA (2019)
		(<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	
		IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	100 %
P.1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	IKSS 3.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	84%
		IKSS 3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	500
		IKSS 3.3. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	78%
P.2. Program Dukungan Manajemen dan	SS.4 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	IKSS 4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	40%
		IKSS 4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV	40%

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET KINERJA (2019)
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS		atau Strata I	
P.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	SS.3 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	IKSS 3.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65%

4.2. Kerangka Pendanaan BPS Kabupaten Majalengka

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Kabupaten Majalengka. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Tabel. 4-3 Alokasi Anggaran 2015-2019 Menurut Program (Juta Rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. ALOKASI PROGRAM TEKNIS					
I. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	6.718,688	15.592,5			
- Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	6.718,688	15.592,5			
B. ALOKASI PROGRAM GENERIK					
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	3.668,216	3.953,8			
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	3.668,216	3.953,8			
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	122	138			
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	122	138			
Total	10.508,904	19.684,3			

BAB 5

Penutup



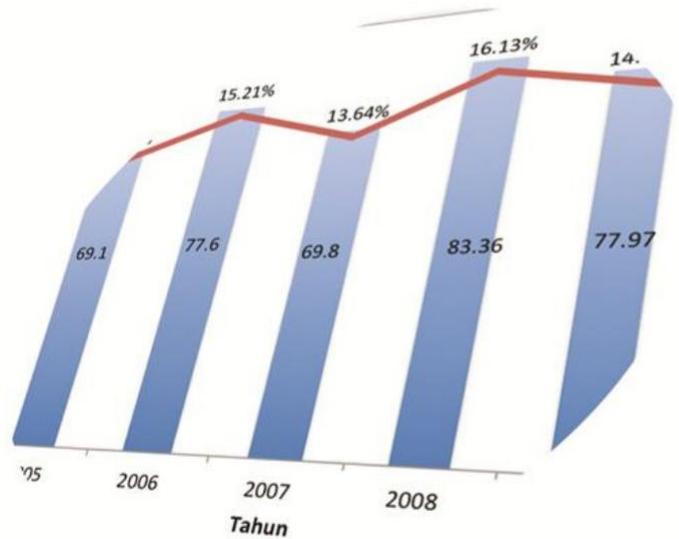
5.1. P e n u t u p

Renstra BPS Kabupaten Majalengka periode 2015-2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan dalam Renstra BPS 2015 - 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas.

Dalam Renstra BPS Kabupaten Majalengka 2015–2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN



Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kabupaten Majalengka

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
BPS Kabupaten Majalengka							10.508,904	19.684,3				
	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS											1. Seksi Statistik Sosial
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	80%	80%	80%	80%						2. Seksi Statistik Produksi
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	50%	53%	56%	59%	62%						3. Seksi Statistik Distribusi
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						4. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
	1.4. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	67	67	67	67	67						5. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
	1.5. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						6. Subbag Tata Usaha
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<i>(respondent engagement)</i>											
	2.1. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	99,42%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%						
	2.2. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	97%	97%	97%	97%	97%						
	2.3. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	SS.3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)											
	3.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	84%	84%	84%	84%	84%						
	3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	300	350	400	450	500						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	3.3. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	70%	72%	74%	76%	78%						
	3.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65%	65%	67%	65%	65%						
	SS.4. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS											
	4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	33,33%	34%	36%	38%	40%						
	4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	30,30%	31%	33%	35%	40%						
	SS.5. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS											
	5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	60	63	65	68	70						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							6.718,688	14.857,08				
KEGIATAN 2895: BPS Kabupaten Majalengka (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)							6.718,688	14.857,08				
	Jumlah Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan survei	1	1	1	1	1	164,837	2,69				1. Seksi Statistik Sosial 2. Seksi Statistik Produksi 3. Seksi Statistik Distribusi 4. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 5. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah dokumen updating peta	271										
	Jumlah Laporan Diseminasi Statistik	1	1	1	1	1	33,926	71,01				
	Jumlah Laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei kebutuhan data	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	1	1	1	1	84,899	144,48				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei ketenagakerjaan dan kependudukan dengan pendekatan rumah tangga	99,09%	99%	99%	99%	99%						
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk	-	-	-	1	1						
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu	-	-	-	1	1						
	Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus	1	-	-	-	-	340,482					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu	1	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Penduduk Antar Sensus	99%	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	1	1	1	1	1	136,981	235,79				
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan	98,61%	99,6%	99,7%	99,8%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	rumah tangga											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	1	1	1	2	1	6,94	12,96				
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	1	1	1	2	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan	-	-	-	1	-						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pendataan Potensi Desa											
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat waktu	-	-	-	1	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Pendataan Potensi Desa	-	-	-	100%	-						
	Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial	1	-	-	-	-	5.374,900					
	Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	100%	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1	1	1	1	1	275,699	31,9				
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	1	1	1	1	1	6,982	7,2				
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pendekatan usaha											
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	1	1	1	1	1	103,096	108,49				
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi dengan pendekatan usaha	95%	95%	95%	95%	95%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	2	2	2	1	1	4,388	8,98				
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei statistik distribusi dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	statistik distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha											
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016	1	1	1	-	-	44,1	14.854,39				
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu	1	1	1	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Sensus Ekonomi 2016	-	98%	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga	1	1	2	1	1	43,48	56,86				
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei statistik harga	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dengan pendekatan rumah tangga											
	Persentase memasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei statistik harga dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup yang terbit tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Persentase memasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei biaya hidup	-	-	-	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)	-	-	1	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Survey Penyempurnaan Diagram Timbang	-	-	1	-	-						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	(2017=100) yang terbit tepat waktu											
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)	-	-	100%	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	1	1	1	1	1	12,471	6,53				
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	usaha											
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei statistik survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi	1	1	1	1	1	11,06	18,99				
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN	-	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei neraca produksi dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran	1	1	1	1	1	9,957	18,95				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik	54	54	54	54	54	64,49	13,28				
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang tebit tepat waktu	54	54	54	54	54						
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN	1	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS												Subbag Tata Usaha
KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)												
	Layanan Perkantoran						3.668,216	3.953,8				Subbag Tata Usaha
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen	3	3	3	3	3						
	Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Sarana dan Prasarana TIK dalam kondisi Baik	85%	85%	85%	85%	85%						
	Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik	85%	85%	85%	85%	85%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							122	138				Subbag Tata Usaha
KEGIATAN 2891: (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)							122	138				
	Jumlah Pengadaan kendaraan Bermotor	-										Subbag Tata Usaha
	Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan	-										
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	3					21	70,5				
	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	100%										
	Jumlah Pengadaan kebutuhan peralatan dan fasilitas	39					41	67,5				
	Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100%										
	Jumlah pengadaan	190										

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	kebutuhan gedung dan bangunan yang memadai											
	Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan	100%	-	-	-	-	60	-				

Lampiran 2 : Pendanaan per Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PROGRAM TEKNIS (PPIS) BPS Kabupaten Majalengka	6.718.688.000	15.592.000.000			
1	KEGIATAN 2895: (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)	6.718.688.000	15.592.000.000			
B.	PROGRAM GENERIK (DMPTTL dan PSPA) BPS Kabupaten Majalengka	3.790.216.000	4.091.800.000			
I.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya	3.668.216.000	3.953.800.000			
1	KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)	3.668.216.000	3.953.800.000			
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	122.000.000	138.000.000			
1.	KEGIATAN 2891: (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)	122.000.000	138.000.000			

PELOPOR DATA STATISTIK TERPERCAYA
UNTUK SEMUA

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJALENGKA
Jl. Gerakan Koperasi No. 39 Majalengka 45411
Tel p/Fax : (0233) 281 055
Web: <http://majalengkakab.bps.go.id>
Email: bps3210@bps.go.id

Hak Cipta © 2015 BPS Kabupaten Majalengka
Semua Hak Dilindungi

